

OPTIMALISASI E-GOVERNMENT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

OPTIMALIZATION E-GOVERNMENT TO ERADICATION CORRUPTION

Muchammad Alawy Syihabuddin^{1*}, Ramadhany Nugroho², Aulia Regita Dewi Fitriana³, Inayah Iahiyah⁴

^{1,2,3}Prodi S2 Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya

⁴Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya

*Koresponden email: muchammad.alawy.syihabuddin-2022@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi fokus di berbagai negara, namun karena tantangannya yang kompleks dan beragam maka dibutuhkan usaha yang komprehensif dan diperlukan pendekatan yang inovatif, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi pemberantasan korupsi melalui instrument kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia dan E-Government di lingkungan ASN melalui kajian sistematis literatur selama enam tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis menggunakan 37 artikel yang relevan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pendekatan yang dapat diadopsi dalam mencegah terjadinya korupsi diantaranya, mendorong pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anti korupsi, memperkuat sistem pengendalian internal baik melalui audit, inspeksi mendadak, dan evaluasi (*compliance management*), membangun budaya anti korupsi (*employee relation management*), menerapkan *reward* dan *punishment* bagi yang terlibat (*compensation and benefit*), dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin dengan menerapkan hukum yang lebih ketat untuk pemimpin dan pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi dan implementasi transparansi dalam kekayaan dan pengeluaran mereka. Namun penerapan *e-government* masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut dan memastikan masyarakat umum dapat menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, melalui rekomendasi instrumen kebijakan tersebut birokrasi dapat melangkah menuju sistem pemerintahan yang lebih bersih dari praktik korupsi di masa depan.

Kata kunci: *E-Government*; instrument kebijakan; pemberantasan korupsi

ABSTRACT

The eradication of corruption has been a focus in many countries. Still, because of its complex and diverse challenges, comprehensive and innovative approaches will be needed, especially in the civilian environment, to strengthen the prevention and eradication of corruption in Indonesia. This study aims to review optimizing corruption through the human resource management policy instruments and e-government in the ASN environment through the systematic review of literature review over the past six years. The research method used is a systematic literature review using 37 relevant articles. The review shows an adopted approach to preventing corruption, such as encouraging anti-corruption education and training, strengthening internal control systems through an audit, surprise inspection, and evaluation, building anti-corruption cultures, implementing reward and punishment for those involved, and increasing leadership accountability by applying stricter laws for leaders and high officials involved in corruption and the implementation of transparency in their wealth and spending. However, the e-government application still requires further development to ensure the public can use it easily. Thus, the recommendation of those policy instruments, policy can proceed to a system of government that is cleaner than future corrupt practices

Keywords: *E-Government*; eradication corruption; policy instrument

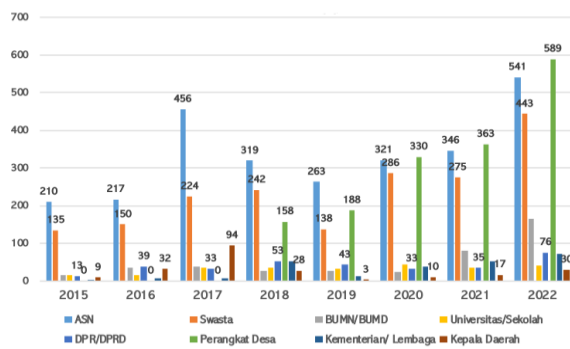
PENDAHULUAN

Korupsi diketahui merupakan salah satu permasalahan global yang sangat penting karena mempunyai dampak yang luas dan signifikan terhadap proses berjalannya pemerintahan, pembangunan ekonomi dan keadilan sosial suatu negara (Albanese, 2022; K. Chen, 2019; OECD, 2016). Model pemberantasan korupsi yang efektif sering kali memerlukan pendekatan multi-disiplin yang holistik dan membutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat, dimana partisipasi publik dapat tercapai dengan adanya kesadaran dan pendidikan tentang anti korupsi sehingga dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik koruptif (Sinha et al., 2019).

Indonesia telah berjuang dalam pemberantasan korupsi di sektor publik selama dua decade. Inisiatif pemerintah pemberantasan korupsi dinyatakan dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Namun, sampai saat ini korupsi masih menjadi masalah serius dimana indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada peringkat 110 dunia, tertinggal di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand pada level ASEAN (Madrim, 2023). Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kepercayaan publik dan investor asing terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Purnama, 2022; Rizal & Wondabio, 2023).

Banyaknya oknum aparaturnya penyelenggaraan pemerintahan yang terlibat dalam kasus korupsi, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan terpidana korupsi tertinggi dari tahun 2015 s/d tahun 2022 (Gambar 1). Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan tentang integritas ASN, transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan (Habibi & Nugroho, 2018; Sedarmayanti & Nurliawati, 2012).

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pendekatan yang inovatif dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.



Sumber: Indonesia Corruption Watch (2023)

Gambar 1. Jumlah Terpidana Korupsi Tahun 2015-2022

Memahami metode dan alasan perilaku korup di lingkungan ASN sangatlah penting untuk mengembangkan strategi pemberantasan korupsi yang efektif melalui analisis kasus-kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Dengan demikian, maka dibutuhkan metode tinjauan literatur sistematis untuk memahami pengetahuan yang ada dan mengidentifikasi arah penelitian baru (Jones & Gatrell, 2014). Misalnya, mengkaji metode dan faktor pendorong atau motif penyebab perilaku korupsi di lingkungan ASN untuk memahami bagaimana mekanisme korupsi beroperasi dalam struktur birokrasi. Karena sejauh ini segelintir politisi dan birokrat justru merusak system birokrasi yang ada dan merusak terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan professional (Ghaniy, 2017). Yang seharusnya bertanggung jawab atas terciptanya proses professional, beirntegritas tinggi, dan siap melayani masyarakat (Nurprojo & Setyo, 2014). Mengidentifikasi instrumen kebijakan apa saja yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan tersebut. Salah satu upaya pemerintah memperkuat instrumen hukum dengan membentuk Lembaga pemberantasan korupsi, namun upaya penegakan hukum dan peradilan tidak berfungsi dengan baik dan aparat penegak hukum tidak bekerja dengan integritas (Daeng et

al., 2022). Selain itu memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya mengoptimalkan imple-mentasi instrumen kebijakan dari perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik dan digitalisasi sistem pemerintahan (*e-government*). Di negara-negara berkembang penerapan e-government mempunyai resiko kegagalan yang lebih besar ketika Tingkat korupsi masih tinggi(Suardi, 2021).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur sistematis yang bertujuan untuk menganalisis serangkaian artikel secara sistematis yang relevan dengan bidang penelitian ini. Tinjauan sistematis ini mengikuti item pelaporan untuk Metodologi Tinjauan Sistematis dan Meta-Analisis (PRISMA) (Liberati et al., 2009; Moher et al., 2009). PRISMA adalah metodologi yang dapat diperiksa berdasarkan daftar item yang sering digambarkan dalam diagram alur (Lyra et al., 2022). Pada proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yang pertama adalah eksplorasi topik. Para penulis menentukan topik dan konsep sebagai kata kunci pencarian dan mengidentifikasi pertanyaan penelitian serta tujuan yang akan dicapai dari pencarian literatur (Jocovski et al., 2020).

Beragam kombinasi kata kunci digunakan untuk mendapatkan artikel yang sesuai dari berbagai sumber seperti, publikasi jurnal, prosiding konferensi, publikasi buku dll. Kata kunci dan frasa dihubungkan secara logis oleh operator Boolean dalam judul, abstrak, dan kata kunci. Adapun string pencarian: (fraud*ATAU corruption*ATAU whistleblowing*) DAN (civil service* ATAU civil servants* ATAU human resource management*) DAN (public sector* ATAU government* ATAU e-govern-ment*).

Tahap kedua melakukan pencarian dan penyaringan literatur yang sesuai dengan topik penelitian dengan metode bola salju dengan prosedur (Wohlin, 2014) menggunakan software Publish or Persih dengan kriteria berikut ini:

- a. Topik yang dikaji meliputi penyebab perilaku korupsi di lingkungan ASN, instrument kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi, dan implementasi instrumen kebijakan dalam perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik dan digitalisasi sistem pemerintahan (*e-governance*) dalam pemberantasan korupsi.
- b. Penelitian ini menggunakan literatur yang dipublikasikan di beberapa website penerbit

- jurnal, seperti Taylor & Francis, Springer dan Elsevier, dan Emerald. Pencarian literatur di website tersebut bertujuan untuk merinci ruang lingkup penelitian untuk memudahkan penulisan penelitian.
- c. Periode 2018 – 2024 dipilih atas dasar bahwa, selama 6 tahun terakhir pengembangan e-government sebagai Langkah anti korupsi yang efektif di beberapa negara maju dan berkembang masih terus dilakukan pengembangan (L. Chen & Aklikokou, 2021; Wu et al., 2020).
 - d. Jenis sumber penelitian ini berfokus pada artikel dan bukan makalah konferensi karena tidak komprehensif
 - e. Artikel-artikel yang terpilih ditulis dalam Bahasa Inggris karena merupakan Bahasa yang paling umum digunakan di jurnal internasional dan untuk akademisi global (Supriharyanti & Sukoco, 2023)

Tahap proses selanjutnya melibatkan pencarian makalah dari penerbit seperti, Springer, Taylor and Francis, Emerald Insight, Wiley-Blackwell, dan Elsevier. Pada tahap ketiga dilakukan penilaian dan seleksi studi. Pada tahap ini melakukan peninjauan pada masing-masing abstrak dan teks lengkap dari studi yang dipilih. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka akan dikeluarkan dari data set akhir. Selanjutnya untuk memastikan objektivitasnya, penelitian ini melakukan review dengan penuli lain untuk melakukan seleksi independent dan membandingkan satu sama lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, hasil yang muncul dari SLR dijelaskan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dari data yang terpilih. Penyajian hasil dibagi secara terstruktur yang berfokus pada definisi, teori, dan metodologi. Bagian selanjutnya diperluas dengan hasil analisis terhadap penyebab, instrument kebijakan pemberantasan korupsi, dan e-government sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan ASN, serta mengkaji kesenjangan dari literatur yang terpilih mengenai instrument pemberantasan korupsi di lingkungan ASN.

Instrument Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam menerapkan suatu kebijakan, pemilihan instrumen kebijakan yang tepat merupakan hal penting yang harus dilakukan agar kebijakan dapat berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan kebijakan (Capano, 2017). Tipologi instrumen kebijakan berdasarkan sumber daya pemerintah

(*Governmental Resources*) pertama kali diperkenalkan oleh Christopher C. Hood, yang mengelompokkan instrumen kebijakan menjadi empat bagian *Nodality; Authority; Trasure; dan Organization* atau yang dikenal dengan NATO (Hood, 1983). Adapun hasil tinjauan sistematis terdapat 13 artikel yang mengkonseptualisasikan instrument kebijakan pemberantasan korupsi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Instrumen Kebijakan Pemberantasan Korupsi Melalui SDM

Judul	Instrument Kebijakan
The effectiveness of anti-corruption policies: measuring the impact of anti-corruption policies on integrity in the public organizations of South Korea	Korupsi dapat diberantas dengan kebijakan anti-korupsi dengan penuh semangat
Identifying Corruption Risk: A Comparison of Bulgaria and the Czech Republic	Soft instrument dianggap lebih efektif dalam menangani semua jenis korupsi melalui peningkatan informasi kepada seluruh masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dampak jangka panjang dari korupsi
Effectiveness of the Public Service Code of Ethics in Controlling Corrupt Behaviour in The Public Service: Opinion from the Grassroots at Toangoma Ward-Temeke Municipal Council	Meningkatkan etika birokrasi dan pelatihan profesional dalam pelayanan public
Public sector reforms and their impact on the level of corruption: A systematic review	Meningkatkan pemahaman yang membedakan intervensi berdasarkan jenis korupsi, faktor risiko, jenis alat kebijakan, dan karakteristik sektor public
Influence of individual values on attitudes toward corruption: What undermine formal anticorruption effectiveness	Menciptakan lingkungan sosial bebas korupsi melalui bimbingan individu, menumbuhkan nilai-nilai sosial yang bersih dan jujur

Setting a Good Example? The Effect of Leader and Peer Behavior on Corruption among Indonesian Senior Civil Servants	Meningkatkan efektivitas kampanye-kampanye pesan antrikorupsi pada poster, spanduk, papan tanda, baliho, atau media lainnya.
Public sector innovation, e-government, and anticorruption in China and India: Insights from civil servants	Mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat, meningkatkan layanan, infrastruktur dan Pendidikan di daerah pedesaan terpencil
Codes of Ethics, Disciplinary Codes, and the Effectiveness of Anti-Corruption Frameworks: Evidence from a Survey of Civil Servants in Poland	Meningkatkan tata kelola sektor public, penerapan disiplin dan kode etik,
Reducing Bureaucratic Corruption: Interdisciplinary Perspectives on What Works Jordan	Reward and punishment, pengawasan, restrukturisasi birokrasi, anti-korupsi, kampanye Pendidikan dan audit anti korupsi.
The Death Sentence for Covid-19 Financial Fraud Perpetrators	Hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam “keadaan tertentu”
Crony capitalism, the party-state, and the political boundaries of corruption	Menerapkan model kapitalisme kroni dan hierarki-partai negara yang bersifat top-down
‘Paying taxes is losing money’: A qualitative study on institutional logics in the tax consultancy field in Romania	Meningkatkan pemahaman yang jelas tentang korupsi dari kegiatan-kegiatan anti-korupsi yang dilakukan untuk masyarakat sipil
Narrative policy of bureaucratic reform in Indonesia: Rules of narrative in mass media	Melakukan reformasi birokrasi dan menata mentalitas ASN dengan baik

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2024)

Kontribusi tinjauan literatur ilmiah pada Tabel 1. yang paling banyak diadopsi adalah kegiatan anti korupsi, edukasi terhadap dampak jangka panjang korupsi melalui kampanye anti korupsi dan media lainnya. Di Ukraina penerapan tindakan anti-korupsi berdampak positif dan mempunyai Tingkat efisiensi yang tinggi (Kisil & Tarasenko, 2022). Tindakan anti-korupsi secara pereventif dan terpusat juga diterapkan di Jerman dengan tujuan untuk meminimalkan penyalahgunaan status resmi pegawai negeri (Kisil & Tarasenko, 2022), meski-

pun penerapan anti-korupsi tidak selalu efektif, namun bisa saja efektif jika diberikan pengaturan yang tepat dengan perpadua alat yang tepat (Meyer-Sahling & Mikkelsen, 2022).

Instrument Kebijakan E-Government dalam Pemberantasan Korupsi

Kemajuan ICT apda administrasi public semakin banyak digunakan oleh banyak negara untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah upaya korupsi, salah satunya melalui pengembangan e-Government. Dalam praktiknya, penerapan E-government telah efektif menurunkan tingkat korupsi di Korea (Kim et al., 2009), Amerika Serikat (Shim & Eom, 2008), negara-negara berkembang di Afrika (Ojo, 2019) dan di banyak negara maju maupun negara berkembang lainnya (Andersen, 2009; Mistry & Jalal, 2012; Mouna et al., 2020; Park, 2019). Terutama dengan adanya program *e-procurement* dan *e-delivery service* (Mistry & Jalal, 2012; Shim & Eom, 2008). Adapun hasil tinjauan sistematis terdapat 10 artikel yang mengkonseptualisasikan instrument kebijakan pemberantasan korupsi melalui pemanfaatan e-government yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Instrument kebijakan e-government dalam pemberantasan korupsi

Judul	Instrumen E-Government
The War on Corruption: The Role of Electronic Government	Pemerintah harus berinvestasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menjamin layanan e-government dapat diakses masyarakat dengan mudah.
Parsing the impact of E-government on bureaucratic corruption	Penerapan e-government dan perluasan layanan online menjadi upaya dalam memitigasi korupsi kecil-kecilan.
Identifying Corruption Risk: A Comparison of Bulgaria and the Czech Republic	Penerapan e-government melalui OPEN (Online Procedures Enhancement for Civil Application)
Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence	Pemanfaatan alat ICT yang didesain untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses tata kelola publik
Public sector innovation, e-government, and anticorruption in China and India: Insights from civil servants	Memperkuat komitmen politik terhadap inisiatif e-government

Examining E-Government development effects on corruption in Africa: The mediating effects of ICT development and institutional quality	Meningkatkan infrastruktur ICT untuk mendukung perkembangan e-government
International comparative evidence of e-government success and economic growth: technology adoption as an anti-corruption tool	Menjembatani kesenjangan digital dan memastikan praktik e-government yang adil oleh masyarakat umum
Conceptualizing the impact of corruption in national institutions and national stakeholder service systems on e-government maturity	Mendorong pertumbuhan dan kematangan e-government
Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research	Mengembangkan strategi untuk mensinergikan manfaat pendekatan antikorupsi tradisional yang berbasis ICT, serta meningkatkan pengetahuan dan keahlian ICT para pegawai pemerintah agar dapat merancang platform layanan e-government lebih efektif
Public Satisfaction on Transparency of E-Government Information in Bandung City to Prevent Corruption	Pengaplikasian e-government dan e-budgeting

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2024)

Dalam mencegah korupsi, pemerintah telah memobilisasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan terselenggaranya transparansi informasinya melalui pemanfaatan e-government. Berdasarkan hasil tinjauan literatur negara-negara yang telah menerapkan e-government menghadapi tantangan yang serupa untuk terus mengembangkan platform e-government (I. O. Adam, 2020; Khan & Krishnan, 2019; Martins et al., 2018), meningkatkan keahlian pegawai pemerintah di bidang ICT (Khan et al., 2021) dan menjembatani kesenjangan digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses tata kelola public (I. Adam & Fazekas, 2021; Mouna et al., 2020).

Optimalisasi Instrumen Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Dalam menghadapi beban tugas yang semakin berat bagi KPK, terutama dalam mengatasi permasalahan korupsi yang tengah mengalami kesulitan, diperlukan suatu sistem yang mampu mengajak semua pihak di masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan yang bersifat preventif (Darmayani et al., 2022). Sistem pendidikan anti-korupsi menjadi penting, yang mencakup sosialisasi mengenai berbagai bentuk korupsi, upaya pencegahan, pelaporan, serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi.

Pendidikan anti-korupsi harus diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai lingkungan, termasuk keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat (Karim et al., 2023; Muhamad & A. Gani, 2020). Hal ini merupakan titik krusial dalam memberikan pengertian tentang integritas dan kejujuran kepada generasi muda, terutama sejak usia dini. Selain itu *Whistleblowing System* (WBS) dapat diadopsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memperbolehkan partisipasi aktif dari masyarakat umum serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memberantas praktik korupsi. Sistem ini tidak hanya terbatas pada lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah, tetapi juga diterapkan di berbagai organisasi swasta. Melalui WBS, masyarakat secara luas diberikan kesempatan untuk melaporkan individu atau entitas dalam organisasi yang telah ditunjuk dan diberi mandat untuk menerima pengaduan, serta bertanggung jawab dalam mengelola dan mengarahkannya ke proses selanjutnya.

Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengurangi praktik korupsi dengan meningkatkan gaji pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Gaji ASN terdiri dari beberapa komponen, termasuk Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan Kemahalan. Gaji pokok ASN ditetapkan berdasarkan golongan dari pegawai tersebut, sementara tunjangan kinerja bergantung pada jabatan yang dipegang oleh ASN. Tunjangan kemahalan ASN didasarkan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah, sehingga jumlahnya bervariasi sesuai dengan jabatan dan lokasi tempat ASN tersebut bertugas. Pemerintah juga mengakselerasi pembangunan di remote area adalah memacu kinerja para ASN melalui kebijakan afirmasi (*affirmative action*) berupa pemberian insentif kesejahteraan ASN di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) agar mereka dapat bekerja secara optimal ditengah kondisi keterbatasan dan sulitnya jangkauan geografis yang dialami para ASN di daerah 3T.

Optimalisasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Melalui Sumber Daya Manusia dan Digitalisasi

Dalam konteks ini, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memiliki peran yang sangat penting. Wijaya & Noak (2019) menegaskan bahwa upaya efektif dalam mencegah korupsi dalam struktur pemerintahan adalah dengan meningkatkan moralitas dan martabat sumber daya manusia sesuai dengan etika dan ideologi bangsa. Riwukore et al. (2021) menyatakan bahwa kinerja pegawai yang berperan dalam pencegahan korupsi sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dalam manajemen SDM, seperti pembagian tugas, disiplin, kewenangan, tanggung jawab, pemberian prioritas pada kepentingan publik, Melalui prinsip-prinsip dan praktik yang diterapkan dalam MSDM, upaya pencegahan korupsi dapat diintegrasikan dengan lebih efisien dan efektif melalui pemberian insentif berbasis kinerja yang adil dan transparan, memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat sebagai principal dengan melibatkan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sebagai mitra utama dalam pelaksanaannya.

Pelatihan dapat berupa kegiatan FGD dan workshop untuk mengevaluasi serta melatih peserta Program Pengembangan Kemampuan (PkM) dalam mengembangkan konsep-konsep pengendalian dan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam situasi di mana terdapat konflik kepentingan, para pejabat pemerintahan diwajibkan untuk memberitahukan atasan mereka. Jika pejabat memiliki konflik kepentingan, keputusan atau tindakan akan ditangani oleh atasan atau pejabat lain. Apabila ada laporan dari masyarakat, atasan pejabat harus melakukan pemeriksaan, penelitian, dan menetapkan keputusan atas laporan tersebut paling lambat dalam waktu 5 hari kerja,

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan (*e-government*) adalah upaya yang penting. *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dalam lembaga pemerintahan untuk menciptakan hubungan yang lebih efisien, efektif, dan produktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi dalam layanan publik sehari-hari. *E-government* juga memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menciptakan lingkungan pemerin-

tahan yang mampu mengatasi tantangan dari perubahan global (Zamasi, 2020).

KESIMPULAN

Literatur seputar instrument kebijakan pemberantasan korupsi dalam beberapa decade terakhir menunjukkan kebijakan praktis dengan bukti-bukti yang mengarah pada kebijakan anti korupsi. Sementara itu, pemahaman *e-government* sebagai instrument kebijakan pemberantasan korupsi menghasilkan argument-argumen yang tidak terorganisir dan bertentangan. Sebagai solusi, penelitian ini menggunakan pendekatan SLR untuk merangkum beragam tinjauan literatur secara holistik dan memberikan sejumlah saran untuk memandu penelitian di masa yang akan datang yang relevan dengan bidang ini.

Hasil tinjauan sistematis ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil adalah melalui pendidikan anti-korupsi yang bersifat preventif, dimulai dari usia dini hingga tingkat perguruan tinggi. Di sisi hukum, pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi bagi ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi perlu diperjelas dalam hukum dan peraturan yang ada.

Lebih lanjut, penggunaan insentif berbasis kinerja yang adil, pengawasan yang efektif berdasarkan teori agensi, pelatihan berbasis sumber daya manusia, dan pengelolaan konflik kepentingan menjadi prinsip kunci. Peningkatan moralitas dan martabat sumber daya manusia juga menjadi fondasi yang kuat dalam membangun integritas organisasi. Selain itu, berdasarkan tinjauan sistematis dari penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa penerapan *e-government* masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut dan memastikan masyarakat umum dapat menggunakannya dengan mudah serta menekankan akan pentingnya pemahaman dan tujuan anti-korupsi yang relevan, fokus terhadap konsep *un-learning* dan *re-learning* tentang tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan integritas. Dengan demikian, untuk penelitian di masa yang akan datang diharapkan ada penelitian lanjutan mengenai penerapan *e-government* dalam pemberantasan korupsi di lingkungan ASN

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, I., & Fazekas, M. (2021). Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence. *Information Economics and Policy*, 57. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2021.100950>
- Adam, I. O. (2020). Examining E-Government

- development effects on corruption in Africa: The mediating effects of ICT development and institutional quality. *Technology in Society*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101245>
- Albanese, J. S. (2022). Why Corruption is the Largest Problem in the World Freda Adler Distinguished International Scholar Award Address. *International Criminology*, 2(2), 103–110. <https://doi.org/10.1007/s43576-022-00060-3>
- Andersen, T. B. (2009). E-Government as an anti-corruption strategy q. *Information Economics and Policy*, 21(3), 201–210. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2008.11.003>
- Arsalan, S., Latif, D. V., & Saadah. (2019). Public satisfaction on transparency of e-government information in Bandung city to prevent corruption. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 1–10.
- Bologna, G. J., & Lindquist, R. J. (1993). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Wiley.
- Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(5), 486–504. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>
- Capano, G. (2017). How policy instruments are chosen: patterns of decision makers' choices. *Policy Sciences*, 50(2), 209–233. <https://doi.org/10.1007/s11077-016-9267-8>
- Chen, K. (2019). How bad corruption is around the world? *International Politics Reviews*, 7(1–2), 25–35. <https://doi.org/10.1057/s41312-019-00070-w>
- Chen, L., & Aklikokou, A. K. (2021). Relating e-government development to government effectiveness and control of corruption: a cluster analysis. *Journal of Chinese Governance*, 6(1), 155–173. <https://doi.org/10.1080/23812346.2019.1698693>
- Daeng, M. Y., Zulkarnaini, & Yusuf, M. F. D. (2022). Strategy Eradication Corruption Through Strengthening Legal Instruments. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 1(4). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i4.95>
- Darmayani, S., Pravita, V. D., Titahelu, J. A. S., Nugroho, L., Destiyanti, A. Z., Prasetyo, H., Muharam, R. S., Riyanti, D., Manik, T. S., Sopacua, M. G., Herniawati, Sembada, A. D., & Rinaldi, K. (2022). *Pendidikan Antikorupsi*. Widina Bhakti Persada.
- Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah-Blankson, T., Nickow, A., & Zhang, D. (2018). Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works. *World Development*, 105, 171–188. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.015>
- Ghaniy, N. (2017). Political, Social and Economic Determinants of Corruption. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 144–149.
- Habibi, F., & Nugroho, A. (2018). Penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi dana desa di kabupaten pandeglang. *Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, XV(2), 197–211.
- Haryono, B. S., Nugroho, A. A., Putera, F., & Noor, I. (2024). Narrative policy of bureaucratic reform in Indonesia: Rules of narrative in mass media. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(1). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i1.2842>
- Hood, C. C. (1983). *Tools of Government*. Macmillan Education.
- Jocevski, M., Arvidsson, N., & Ghezzi, A. (2020). Interconnected business models: present debates and future agenda. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 35(6), 1051–1067. <https://doi.org/10.1108/JBIM-06-2019-0292>
- Jones, O., & Gatrell, C. (2014). Editorial: The future of writing and reviewing for IJMR. *International Journal of Management Reviews*, 16(3), 249–264. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12038>
- Kalesnikaite, V., Neshkova, M. I., & Ganapati, S. (2023). Parsing the impact of E-government on bureaucratic corruption. *Governance*, 36(3), 827–842. <https://doi.org/10.1111/gove.12707>
- Kapeli, N. S., & Mohamed, N. (2019). Battling corruption in Malaysia: What can be learned? *Journal of Financial Crime*, 26(2), 549–555. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2018-0044>
- Karim, A., Fathurrohman, O., Muhammadun, Saripudin, W., Rahmat, D., & Mansir, F. (2023). Altruistic works, religion, and corruption: Kiais' leadership to shape anti-corruption values in pesantren. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2238968>
- Khambekova, K., Los, A., & Huss, O. (2021). Corruption framing and formation of action strategies: case of regional civil society organizations in Ukraine. *Crime, Law and*

- Social Change*, 76(3), 277–297. <https://doi.org/10.1007/s10611-021-09966-x>
- Khan, A., & Krishnan, S. (2019). Conceptualizing the impact of corruption in national institutions and national stakeholder service systems on e-government maturity. *International Journal of Information Management*, 46, 23–36. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.014>
- Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. *Technological Forecasting and Social Change*, 167. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120737>
- Kim, S., Jeong, H., & Lee, H. (2009). An institutional analysis of an e-government system for anti-corruption: The case of OPEN. *Government Information Quarterly*, 26(1), 42–50. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.09.002>
- Kisil, Z. R., & Tarasenko, O. S. (2022). International Experience in Preventing Corruption as a Vector for Creating a National Anti-Corruption Strategy in Ukraine. *Social and Legal Studies*, 5(3), 9–15. <https://doi.org/10.32518/2617-4162-2022-5-3-9-15>
- Klitgaard, R. (1991a). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Klitgaard, R. (1991b). *Controlling Corruption*. Univ of California Press.
- Koolae, E., Zarrinnarges, Y., & Akbari, Z. (2020). Causes of the failure of the state in Syria (2010-2019). *Geopolitics Quarterly*, 16(4), 288–309.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 339. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2700>
- Lyra, M. S., Damásio, B., Pinheiro, F. L., & Bacao, F. (2022). Fraud, corruption, and collusion in public procurement activities, a systematic literature review on data-driven methods. *Applied Network Science*, 7(1). <https://doi.org/10.1007/s41109-022-00523-6>
- Madrim, S. (2023, February 1). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Terburuk Sejak Reformasi. *VoaIndonesia.Com*. <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-menurun-terburuk-sejak-reformasi/6942025.html>
- Martins, J., Fernandes, B., Rohman, I., & Veiga, L. (2018). The war on corruption: The role of electronic government. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 11020 LNCS, 98–109. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98690-6_9
- Maslow, A. (1954). *Motivation and Personality*. Harpers.
- Meyer-Sahling, J. H., & Mikkelsen, K. S. (2022). Codes of Ethics, Disciplinary Codes, and the Effectiveness of Anti-Corruption Frameworks: Evidence from a Survey of Civil Servants in Poland. *Review of Public Personnel Administration*, 42(1), 142–164. <https://doi.org/10.1177/0734371X20949420>
- Min, K. sun. (2019). The effectiveness of anti-corruption policies: measuring the impact of anti-corruption policies on integrity in the public organizations of South Korea. *Crime, Law and Social Change*, 71(2), 217–239. <https://doi.org/10.1007/s10611-019-09814-z>
- Mistry, J. J., & Jalal, A. (2012). *An Empirical Analysis of the Relationship between e-government and Corruption*. 12(May), 145–176. <https://doi.org/10.4192/1577-8517-v12>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *Journal of Clinical Epidemiology*, 62(10), 1006–1012. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.005>
- Mouna, A., Nedra, B., & Khaireddine, M. (2020). International comparative evidence of e-government success and economic growth: technology adoption as an anti-corruption tool. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(5), 713–736. <https://doi.org/10.1108/TG-03-2020-0040>
- Muhamad, N., & A. Gani, N. (2020). A decade of corruption studies in Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 423–436. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2019-0099>
- Nurprojo, & Setyo, I. (2014). Merit system dan politik birokrasi di era otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 8(1), 45–52.
- OECD. (2016). *Putting an End to Corruption*.
- Ojo, J. S. (2019). e-Governance and Anti-Corruption War in Africa: The Nigeria Experience. *E-Services*.
- Park, C. H. (2019). *E-government as an anti-corruption tool: panel data analysis across countries*. <https://doi.org/10.1177/0020852318822055>

- Prabowo, H. Y., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2018). Forgetting Corruption: Unlearning the knowledge of corruption in the Indonesian public sector. *Journal of Financial Crime*, 25(1), 28–56. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2016-0048>
- Purba, N., Sahlepi, M. A., & Sulistyawati, S. (2020). The death sentence for Covid-19 financial fraud perpetrators. *Sriwijaya Law Review*, 4(2), 261–269. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.432.pp261-269>
- Purnama, M. C. (2022). Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Investasi Asing Langsung di ASEAN-5. *Jurnal EKonomi Aktual*, 2(2), 41–48.
- Riwukore, J. R., Alie, M., & Habaora, F. (2021). Kepemimpinan Transformasional Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Ecoment Global*, 6(1), 87–96. <https://doi.org/10.35908/jeg.v6i1.1327>
- Rizal, M. R. R., & Wondabio, L. S. (2023). Analisis inkonsistensi antara kinerja dengan kepercayaan publik pada komisi pemberantasan korupsi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 236–253.
- Rutt, R. L., & Lund, J. F. (2014). What role for government? The promotion of civil society through forestry-related climate change interventions in post-conflict nepal. *Public Administration and Development*, 34(5), 406–421. <https://doi.org/10.1002/pad.1699>
- Sedarmayanti, & Nurliawati, N. (2012). Strategi penguatan etika dan integritas birokrasi dalam rangka pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 9(3), 337–362.
- Shim, D. C., & Eom, T. H. (2008). *E-Government and Anti-Corruption: Empirical Analysis of International Data*. 0692. <https://doi.org/10.1080/01900690701590553>
- Silitonga, M. S., van Duijn, M., Heyse, L., & Wittek, R. (2019). Setting a Good Example? The Effect of Leader and Peer Behavior on Corruption among Indonesian Senior Civil Servants. *Public Administration Review*, 79(4), 565–579. <https://doi.org/10.1111/puar.13059>
- Sinha, A., Gupta, M., Shahbaz, M., & Sengupta, T. (2019). Impact of corruption in public sector on environmental quality: Implications for sustainability in BRICS and next 11 countries. *Journal of Cleaner Production*, 232, 1379–1393. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.066>
- Školník, M. (2020). Where have all the non-corrupt civil servants gone? Corruption and trust in public administration in European countries. *Polish Sociological Review*, 211(3), 345–360. <https://doi.org/10.26412/psr211.05>
- Suardi, I. (2021). E-Government, Governance and Corruption in Asian countries. *Emerging Markets: Business and Management Studies Journal*, 8(2), 137–150. <https://doi.org/10.33555/embm.v8i2.180>
- Supriharyanti, E., & Sukoco, B. M. (2023). Organizational change capability: a systematic review and future research directions. *Management Research Review*, 46(1), 46–81. <https://doi.org/10.1108/MRR-01-2021-0039>
- Tu, W., Yang, J., & Zheng, Y. (2020). Influence of individual values on attitudes toward corruption: What undermine formal anticorruption effectiveness. *Asian Journal of Social Psychology*, 23(3), 264–277. <https://doi.org/10.1111/ajsp.12402>
- Wahyono, H., & Narmaditya, B. S. (2022). Structural model of the application of anti-corruption values to local government bureaucrats. *Social Sciences & Humanities Open*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100346>
- Wanner, M. S. T. (2022). Change in policy regimes for disaster risk reduction in Fiji and Nepal. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.103030>
- Wijaya, K. A. S., & Noak, P. A. (2019). Internalisasi Etika Birokrasi Dan Penguatan Sistem Pengendalian Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mencegah Korupsi. *Jurnal Ilmiah Widya Sospolitik*, 1(1), 46. <https://doi.org/10.24843/jiws.2019.v01.i01.p05>
- Wohlin, C. (2014). Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/2601248.2601268>
- Wu, A. M., Yan, Y., & Vyas, L. (2020). Public sector innovation, e-government, and anticorruption in China and India: Insights from civil servants. *Australian Journal of Public Administration*, 79(3), 370–385. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12439>
- Zamasi, S. (2020). *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera*. Universitas Medan Area, Medan.